

PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUBAHAN UU NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DI KOMISI VI DPR RI = Policy Formulation of Amendment of Law no. 19 of 2003 on State Owned Enterprises in Commission VI of the House of Representatives

RP. Zainal Abidin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920533312&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini menganalisis perumusan kebijakan perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di Komisi VI DPR RI. Metode penelitian kualitatif dengan kerangka penafsiran konstruktivisme digunakan untuk mengetahui argumentasi dan gagasan aktor kebijakan dalam merumuskan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks menjembatani konstitusi ekonomi yang berkarakter sosialis dengan neoliberalisme yang tumbuh menjadi mazhab tunggal ekonomi dunia. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan tata kelola BUMN merupakan argumentasi utama perubahan undang-undang. Temuan berikutnya adalah gagasan untuk memperkuat pengawasan rakyat melalui DPR RI dan posisi negara untuk menghadapi neoliberalisme yang tumbuh sebagai mazhab tunggal ekonomi dunia. Hal ini didasarkan kepada konstitusi ekonomi dan pengalaman banyak negara yang mampu mengambil banyak manfaat ekonomi dari neoliberalisme dan kapitalisme seraya meneguhkan peran negara. Relasi negara, rakyat dan pasar yang berjalan seimbang dengan porsi terbesar ada pada negara adalah karakter dari perubahan undang-undang ini. Di samping itu ditemukan pula bahwa kapasitas dan wawasan aktor kebijakan menjadi faktor penentu dalam proses perumusan kebijakan bukan lagi ideologi partai. Penelitian ini memprediksikan pengelolaan BUMN pasca perubahan Undang-Undang BUMN akan semakin berkualitas.

.....

This thesis analyzes the policy of law amendment no 19 of 2003 in commission VI of the House of Representatives. Qualitative constructivism method is used to know the argumentations and ideas of the policy actors in formulating the amendment of law to bridge the socialist constitution of the economy with neo-liberalism that grows into a single school of world economy. The results found that improvements in State Owned Enterprises (SEOs) governance are the main arguments for the amendment. The next finding is the idea of strengthening people's oversight through the House of Representatives and the position of the state to deal with the growing neoliberalism as a single school of world economy. It is based on the economic constitution and the experience of many countries that are able to take many economic benefits from neoliberalism and capitalism while reinforcing the role of the state. Relation of the state, people and markets that run in balance with the greatest position in the state is the character of the amendment of this law. Besides, it was also found that the capacity and insight of policy actors become the decisive factor in the process of policy formulation, it is no longer the ideology of the party. This study predicts the management of SOEs after the law amendment of state-owned companies will be more qualified.